BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru sebagai bagian dari kerja sama *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) pada tahun 2020 hingga 2024 telah diarahkan pada penguatan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus penggerak integrasi kawasan Indo-Pasifik. Melalui keaktifannya, Indonesia mendorong kerja sama ekonomi biru tidak hanya dalam lingkup ASEAN, tetapi juga dengan mitra eksternal, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, selain itu melalui forum-forum internasional yang mendukung perwujudan aspek ekonomi biru. Upaya tersebut selaras dengan visi AOIP yang menekankan dialog, kerja sama, konektivitas, dan pembangunan. Ekonomi biru yang terkandung dalam kerja sama maritim AOIP menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, begitu juga untuk memperkuat sentralitas ASEAN dan menjawab tantangan yang berkaitan dengan ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik

Meski begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan IUU *fishing* dan sampah lautan yang menjadi masalah di tengah mengembangkan sektor ekonomi biru, namun begitu, Indonesia tetap menegaskan komitmennya dan semakin kuat mendorong ekonomi biru sekaligus membahas kedua isu tersebut bersama negara-negara anggota ASEAN dan mitranya. Peran Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai inisiator AOIP dipaparkan dalam kebijakan luar negerinya menunjukkan kemampuan dalam membantu dan mendukung sentralitas ASEAN, bahkan pentingnya menjaga kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan persaingan atas pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok melalui pendekatan ekonomi biru. Kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan peran aktif dalam

menyelaraskan kepentingan dengan agenda bersama ASEAN, menjadikan ekonomi biru tidak hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi sebagai bagian dari diplomasi kawasan untuk menghadapi tantangan maritim di masa kini dan mendatang. Kehadiran AOIP menjadi sarana untuk memperkuat sentralitas ASEAN dengan tetap menjaga kesatuan dan relevansi organisasi dalam merespons dinamika regional maupun global. Oleh karena itu, Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mendorong dan mengembangkan ekonomi biru berdasarkan AOIP selama 2020 hingga 2024, memperlihatkan besarnya antusias Indonesia untuk mengimplementasikan bidang ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik yang akan terus diupayakan pelaksanaannya, tentunya dengan mengajak seluruh negara-negara yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Selanjutnya, Indonesia secara sungguh-sungguh memperluas kerja sama ke negara-negara lainnya, terutama kepada kedua negara yang bersaing di kawasan Indo-Pasifik, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana mampu mendapat dukungan dalam mewujudkan implementasi, memberikan bantuan dana, mendukung konsep AOIP yang telah diinisiasi oleh Indonesia. Bentuk-bentuk implementasi ekonomi biru masih harus diteruskan ke depannya dibarengi dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal tersebut didasarkan bahwa Indonesia tetap dan akan terus memperjuangkan implementasi AOIP melalui pertemuan, kerja sama, pertukaran informasi, penelitian, dan peningkatan segala upaya demi ekonomi biru. Diikuti transparansi kebijakan luar negeri Indonesia secara komprehensif.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengembangkan ekonomi biru yang tercantum di *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) selama tahun 2020–2024, maka penulis memiliki beberapa saran. Pertama, pemerintah

Indonesia perlu memperluas implementasi ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik yang transparan mengingat pemberitaan dan dokumen atas implementasi yang konkret tidak tersedia dalam situs resmi kementerian-kementerian Indonesia. Tidak hanya sekedar sebuah forum diskusi kemitraan dengan negara-negara sesama anggota ASEAN dan negara berkekuatan besar di Indo-Pasifik, tidak pula sekedar platform di organisasi dan pertemuan internasional, melainkan adanya wujud nyata yang walaupun terlihat bahwa ekonomi biru tidak bersifat urgen. Hal ini penting agar ekonomi biru tidak sebatas narasi dalam dokumen AOIP, melainkan benar-benar dioperasionalkan melalui proyek kerja sama maritim, forum ekonomi biru ASEAN, serta penguatan kerja sama di kawasan. Kedua, pemerintah Indonesia disarankan untuk secara aktif meningkatkan kebijakan luar negeri di ekonomi maritim, khususnya dalam menjalin kerja sama inovasi teknologi dan pengawasan laut dengan negara-negara mitra demi mengurangi praktik *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* dan isu sampah lautan yang merugikan secara ekonomi dan ekologis. Dengan langkah-langkah matang dan strategis, diharapkan Indonesia dapat memainkan perannya dalam memperkuat sentralitas ASEAN dan mewujudkan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera melalui pilar ekonomi biru.

6.2.2 Saran Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini secara lebih spesifik dan mendalam, baik dengan fokus pada implementasi kebijakan yang lebih meluas ke negara-negara dan forum internasional lainnya maupun pada analisis efektivitas program kerja sama ekonomi biru antarnegara ASEAN. Penelitian lanjutan juga dapat menggali lebih jauh keterlibatan aktor sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung

ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik. Peneliti selanjutnya pun dapat menggali lebih dalam mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan ekonomi biru di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas disertai dengan data-data terbaru. Ini dapat digunakan untuk memperkaya penelitian poin ekonomi biru yang terdapat dalam AOIP bagi keberlanjutan ke depannya.